

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia guna mencapai masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945, tentu memerlukan biaya yang cukup besar, yangmana hal ini dituangkan dalam suatu rencana yang dinamakan dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Di dalam APBN ini dapat diketahui bahwasannya sumber dana yang diperoleh untuk membiayai pembangunan adalah bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Sumber dari dalam negeri adalah dari sektor migas dan sektor non migas, sedangkan sumber luar negeri adalah dari pinjaman jangka panjang.

Berhubungan keterbatasan sektor migas, maka sektor non migas selanjutnya akan menjadi sektor yang akan diandalkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, disebutkan dalam APBN salah satu sumber sektor non migas, adalah bersumber dari pajak (*tax*). Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan dari sektor non migas yang salah satunya adalah berupa penerimaan pajak, tentu diperlukan peran serta dari seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, khususnya adalah para pelaku usaha di Negara Republik Indonesia, untuk bersama-sama memberikan kontribusinya berupa pajak (*tax*). Tentu dalam pelaksanaan pemungutan pajak ini harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga tinggi Negara (DPR), yaitu sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga

dapat merugikan penerimaan keuangan Negara. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2012 penerimaan pajak akan diperkirakan mencapai Rp 1.016,2 triliun atau sebesar 74,8 persen dari total perkiraan pendapatan, keadaan ini menggambarkan betapa pentingnya peranan penerimaan pajak di dalam APBN Indonesia. Disamping itu penerimaan pajak terus mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,2 persen sejak 2009 hingga 2012. Keadaan ini disatu sisi tentu merupakan hal yang menggembirakan, akan tetapi perlu dipikirkan apakah pertumbuhan ini telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga ke depannya pihak-pihak yang mampu, namun belum membayar pajak dapat sadar dan ikut melaksanakan kewajibannya dalam pembangunan.

Untuk melihat kondisi empiris kepatuhan pajak, berikut di bawah ini disampaikan tabel yang menggambarkan perihal tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Wajib Pajak OP dan Badan Tahun 2012 Di Indonesia

No.	Uraian	Orang Pribadi	Badan Usaha (Tanpa Usaha Mikro)
1.	Populasi	240 juta	22,6 juta
2.	Aktif Bekerja/Kegiatan Usaha Domisili Tetap	110 juta	12,9 juta
3.	Perkiraan Penghasilan di atas PTKP	60 juta	-
4.	Perkiraan Badan Usaha yang memiliki laba usaha	-	5 juta
5.	Wajib Pajak Terdaftar	19,9 juta	1,9 juta
6.	SPT yang dilaporkan tahun 2011	8,8 juta	520 ribu
7.	Rasio SPT Badan terhadap Badan Usaha Domisili Tetap(6:4)	-	10,4%
8.	Rasio SPT OP terhadap bekerja di atas PTKP(6:3)	14,7%	-

Sumber : Suplemen Pajak 2012 Kementerian Keu. RI, Direktorat Jend. Pajak

Sedangkan data mengenai jumlah wajib pajak khususnya wajib pajak badan usaha industri yang ada di Kabupaten Deli Serdang sampai tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Jumlah Wajib Pajak Badan Tahun 2012 Di Deli Serdang

No.	Uraian	Badan Usaha Industri	Keterangan
1.	Populasi	346	
2	Aktif Beroperasi	197	
3.	Perkiraan Badan Usaha Yang Memiliki Laba Usaha	106	
4.	Wajib Pajak Terdaftar	346	
5.	SPT Yang Dilaporkan Tahun 2012	145	

Sumber: Biro Pusat Statistik Deli Serdang (Deli Serdang Dalam Angka 2012)

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum bayar pajak. Perihal tersebut di ataslah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi jumlah pembayaran pajak, dan dalam hal ini penulis membatasi hanya pajak penghasilan badan, hal ini disebabkan kontribusi pajak penghasilan badan masih terasa sangat rendah, apalagi kalau dilihat dari tabel jumlah pembayar pajak penghasilan badan dibandingkan dari sisi jumlah populasinya serta dilihat dari sisi jumlah wajib pajak badan yang telah memiliki laba. Dari fenomena yang terjadi terlihat faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembayaran pajak penghasilan badan yang perlu dianalisis, adalah: *Net Profit Margin*, ukuran perusahaan, himbauan dan sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak dan disamping itu perlu juga dianalisis apakah pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai pengaruh atau apakah dapat memoderasi *Net Profit Margin*, ukuran perusahaan, himbauan dan sosialisasi, kepatuhan wajib pajak badan secara simultan dan secara parsial terhadap jumlah pembayaran pajak penghasilan

badan. Dan penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan industri yang berada di Kabupaten Deli Serdang, mengingat di Kabupaten ini banyak berdiri perusahaan industri bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Sumatera Utara, yang seharusnya dapat memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak penghasilan badan.

Sejak dimulainya reformasi perpajakan (*tax reform*) di Indonesia pada tahun 1984, dimana terjadi perubahan sistem dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yaitu: dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan dalam perpajakan, dan sebagai akibat dari perubahan sistem ini, maka pihak Direktorat Jenderal Pajak wajib melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi pajak.

Tujuan dari pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi ini yang salah satunya dilaksanakan melalui pemeriksaan pajak adalah agar pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan menjaga agar wajib pajak tersebut tidak berlaku curang, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat diamankan, yang selanjutnya tentu akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya, yang salah satunya adalah berupa pembayaran pajak penghasilan badan, dan hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan yang sangat penting di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sehingga kelangsungan pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai guna, mencapai masyarakat adil dan makmur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Net Profit Margin*, ukuran perusahaan, himbauan dan sosialisasi, serta kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh secara simultan dan secara parsial terhadap jumlah pembayaran pajak penghasilan badan pada perusahaan industri di Kabupaten Deli Serdang.
2. Apakah pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating dapat memoderasi *Net Profit Margin*, ukuran perusahaan, himbauan dan sosialisasi, kepatuhan wajib pajak badan secara simultan dan secara parsial terhadap jumlah pembayaran pajak penghasilan badan pada perusahaan industri di Kabupaten Deli Serdang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fakta di lapangan yaitu:

1. *Net Profit Margin*, ukuran perusahaan, himbauan dan sosialisasi serta kepatuhan wajib pajak badan dapat mempengaruhi secara simultan dan secara parsial terhadap jumlah pembayaran pajak penghasilan badan pada perusahaan industri di Kabupaten Deli Serdang.
2. Pengaruh pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating terhadap *Net Profit Margin*, ukuran perusahaan, himbauan dan sosialisasi serta kepatuhan wajib pajak badan secara simultan dan secara parsial

terhadap jumlah pembayaran pajak penghasilan badan pada perusahaan industri di Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait yaitu bagi:

1. Pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Kabupaten Deli Serdang sebagai bahan masukan dalam pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak badan khususnya perusahaan industri yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
2. Masyarakat, khususnya para wajib pajak badan, yaitu perusahaan industri, agar lebih dapat meningkatkan pemahaman dan kesadarannya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Indonesia, sehingga mau untuk meningkatkan lagi pembayaran pajak penghasilan , khususnya lagi pajak penghasilan badan.
3. Akademis, diharapkan penelitian ini, dapat memberikan tambahan literatur dan dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya.
4. Penulis adalah untuk pembelajaran dan pemahaman terhadap pengaruh *Net Profit Margin*, ukuran perusahaan, himbuan dan sosialisasi, serta kepatuhan wajib pajak badan terhadap jumlah pembayaran pajak penghasilan badan dan terhadap pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating, apakah dapat memoderasi *Net Profit Margin*, ukuran perusahaan, himbuan dan sosialisasi serta kepatuhan wajib pajak dapat

berpengaruh secara simultan dan secara parsial terhadap jumlah pembayaran pajak penghasilan badan pada perusahaan industri di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2012.

1.5 Originalitas

Penelitian ini adalah merupakan replikasi penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh Agusti dan Herawaty (2009) yaitu dengan judul: “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Grogol Jakarta Petamburan ”. Dimana perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Variabel bebas penelitian ini adalah: *Net Profit Margin*, ukuran perusahaan, himbauan dan sosialisasi serta kepatuhan wajib pajak badan di Kabupaten Deli Serdang, sedangkan peneliti terdahulu variabel bebasnya adalah kepatuhan wajib pajak dan penghasilan kena pajak sebagai variabel kontrol di KPP Pratama Grogol Jakarta Petamburan.
2. Variabel terikat penelitian ini adalah jumlah pembayaran pajak penghasilan badan di Kabupaten Deli Serdang, sedangkan peneliti sebelumnya adalah peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Grogol Jakarta Petamburan.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2012, sedangkan peneliti terdahulu adalah data tahun 2006 - 2007.

4. Populasi penelitian ini adalah perusahaan industri besar dan menengah di Kabupaten Deli Serdang, sedangkan peneliti terdahulu adalah seluruh jenis perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Grogol Jakarta Petamburan.